



---

**ANALISIS TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN  
TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2018  
PADA SATUAN KERJA DIKEWILAYAHAN POLDA JATIM**

**Hera Novita**  
**Pascasarjana Universitas Wijaya Putra Surabaya**

---

**INFORMASI ARTIKEL**

**ABSTRAK**

---

*Dikirim : 22 September 2020  
Revisi pertama : 08 Oktober 2020  
Diterima : 15 Oktober 2020  
Tersedia online : 28 Oktober 2020*

---

*Kata Kunci: Penyerapan Anggaran,  
Jumlah dan Kompetensi Personel,  
Kegiatan Operasi Kepolisian*

---

*Email : heranovita@gmail.com*

---

*Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subyek penelitian adalah Kepala seksi keuangan satuan kerja / Kasikeu satuan kerja di kewilayahan Polda Jatim. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tingkat penyerapan anggaran satuan kerja di wilayah Polda Jatim yang pada triwulan I sampai dengan triwulan III masih di bawah target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk tingkat kementerian/lembaga dan satuan kerja di bawahnya. Penelitian ini menggali informasi dari 10 informanyang menduduki jabatan sebagai Kasikeu di tingkat satuan kerja terkecil dilingkungan PoldaJatim, yaitu Polresta dan Polres. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompeten dan jumlah sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Kegiatan operasi kepolisian dengan perencanaan yang baik mempengaruhi penyerapan anggaran. Dapat disimpulkan bahwa penambahan jumlah personel, kompetensi yang dimiliki dan perencanaan kegiatan operasi kepolisian yang tepat dapat meningkatkan penyerapan anggaran pada triwulan I sampai dengan triwulan III.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Perkembangan rendahnya tingkat penyerapan anggaran di Indonesia merupakan fenomena yang hampir terjadi setiap tahun baik itu di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) maupun tingkat daerah. Pemerintah telah mengeluarkan 3 (tiga) paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu yang diatur dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Jimeka, 2016). Oleh sebab itu, penganggaran dalam sektor publik harus memperhatikan efektif, efisien dan ekonomis sehingga dana anggaran yang dibuat pada akhirnya tidak menggagalkan anggaran yang telah disusun. Apabila total penyerapan anggaran masih rendah hal ini menunjukkan indikasi belum optimalnya peran pemerintah dalam memberikan kontribusi pada pendapatan domestik bruto.

Meskipun undang-undang tentang keuangan Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) disusun sesuai kebutuhan penyelenggara pemerintahan Negara, pelaksanaan tata kelola pemerintahan masih ditemukan masalah lambatnya penyerapan dana APBN oleh kementerian Negara / lembaga dan satuan kerja (satker) di bawahnya. Dana yang sudah dianggarkan di APBN tidak semuanya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, mengambil kebijakan, terutama dalam hal pengadaan barang.

Menurut Malahayati (2015:11) penyerapan anggaran yang maksimal harus juga diikuti dengan perencanaan anggaran yang baik. Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan suatu program atau kebijakan yang dilakukan Pemerintah. Secara umum penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu. Pada organisasi sektor publik atau entitas pemerintahan, penyerapan anggaran diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode tertentu.

Keterlambatan penyerapan anggaran merupakan masalah yang klasikal di setiap Kementerian Lembaga maupun pada satuan kerja di daerah dan sampai saat ini masih sulit ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Selain itu masalah ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar namun hampir merata terjadi di setiap daerah. Maka sangat wajar jika banyak pihak yang khawatir dengan kondisi penyerapan anggaran APBN.

Jika penyerapan anggaran tidak mencapai target sangat perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah terutama untuk jenis belanja barang dan belanja modal. Pada penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran akan difokuskan berdasarkan kualitas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada satuan kerja kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur.

Kurangnya kesiapan satuan kerja di awal tahun anggaran karena tidak adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan jadwal pencairan dana dalam DIPA

yang telah disusun sebelumnya. Dimanajadwal pencairan dana dalam DIPA tidak dijadikan panduan bagi sebagian besar satuan kerja untuk melakukan penarikan dana. Pada halaman 3 DIPA satuan kerja telah memuat jadwal rencana penarikan dana, hal ini seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai panduan dalam rangka penyusunan jadwal rencana pencairan anggaran namun hal tersebut sering diabaikan oleh satuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan/program pada tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan hasil Laporan Realisasi Anggaran dari Satuan Kerja di kewilayahan Kepolisian Daerah Jawa Timur, khususnya pada triwulan I, triwulan II dan triwulan III tahun anggaran 2018, maka peneliti akan menyusun tesis yang berjudul “Analisis Tingkat Penyerapan Anggaran Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja di kewilayahan Polda Jatim”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana penyerapan anggaran pada triwulan I dalam laporan realisasi anggaran tahun 2018 yang disusun oleh Satuan Kerja di kewilayahan Polda Jatim?
2. Bagaimana penyerapan anggaran pada triwulan II dalam laporan realisasi anggaran tahun 2018 yang disusun oleh Satuan Kerja di kewilayahan Polda Jatim?
3. Bagaimana penyerapan anggaran pada triwulan III dalam laporan realisasi anggaran tahun 2018 yang disusun oleh Satuan Kerja di kewilayahan Polda Jatim?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penyerapan anggaran pada triwulan I dalam laporan realisasi anggaran tahun 2018 yang disusun oleh satuan kerja di kewilayahan Polda Jatim
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penyerapan anggaran pada triwulan II dalam laporan realisasi anggaran tahun 2018 yang disusun oleh satuan kerja di kewilayahan Polda Jatim
3. Untuk mengetahui dan menganalisa penyerapan anggaran pada triwulan III dalam laporan realisasi anggaran tahun 2018 yang disusun oleh satuan kerja di kewilayahan Polda Jatim.

### **Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan dua manfaat yaitu manfaat secara praktis dan teoritis yang antara lain dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Kepala Satuan Kerja, menambah pengetahuan dan pengalaman untuk segera mengambil langkah-langkah awal yang akan mendorong daya serap anggaran sesuai dengan rencana kegiatan dan rencana penggunaan anggaran yang di susun pada setiap awal tahun anggaran.

- b. Bagi seluruh fungsi, memudahkan dalam menyusun rencana kegiatan dan rencana penggunaan anggaran dengan mempertimbangkan situasi kamtibmas yang berkembang pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perkiraan intelejen.
- c. Bagi pelaksana kegiatan/pengguna anggaran, digunakan sebagai pemicu dalam melaksanakan kegiatan dengan anggaran berbasis pada kinerja dan segera melakukan revisi DIPA tahun anggaran berjalan bila terjadi perubahan kegiatan.
- d. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut untuk menambah wawasan penulis tentang laporan realisasi anggaran khususnya mengenai daya serap anggaran untuk belanja barang dan belanja modal. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai sarana bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang telah penulis pelajari di bangku perkuliahan.

## 2. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang di hasilkan dari penelitian ini antara lain yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmu ekonomi manajemen keuangan khususnya mengenai penyusunan laporan realisasi anggaran, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam menyajikan Laporan Realisasi Anggaran khususnya pada triwulan I sampai dengan triwulan III dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran khususnya pada materi laporan keuangan khususnya Laporan Realisasi Anggaran.

## KAJIAN PUSTAKA

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara adalah suatu dokumen yang memuat perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran serta perincian berbagai kegiatan di bidang pemerintahan negara yang berasal dari pemerintah untuk waktu satu tahun (Rachmat, 2010: 139). Anggaran tersebut merupakan batas tertinggi dari pengeluaran negara untuk melaksanakan tugas dan keperluan negara dan penerimaan negara yang diperkirakan dapat menutup pengeluaran dalam periode tertentu, agar tidak menimbulkan defisit anggaran.

Setiap tahun pemerintah menghimpun dan membelanjakan dana triliuna rupiah melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Istilah APBN yang dipakai di Indonesia secara formal mengacu pada anggaran pendapatan dan belanja pemerintah pusat, tidak termasuk anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah (APBD) dan BUMN. Penyusunan anggaran Negara ini merupakan rangkaian aktifitas yang melibatkan banyak pihak, termasuk semua departemen dan lembaga, serta dewan perwakilan rakyat (DPR). Peran DPR dalam penyusunan APBN dalam dua tahun ini telah menjadikan proses penyusunan APBN menjadi lebih demokratis, transparan, objektif, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. (Sony, 2010: 57).

Sesuai UUD 1945, APBN diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Dalam hal ini, presiden berkewajiban menyusun dan mengajukan rancangan APBN (RAPBN) kepada DPR. RAPBN tersebut memuat asumsi, perkiraan penerimaan, pengeluaran, defisit/surplus, dan pembiayaan defisit, serta kebijaksanaan pemerintah. Selain itu juga dimuat perkiraan rinci atas pengeluaran/penerimaan departemen/lembaga, proyek,

data actual, dan informasi yang terkait lainnya. Semuanya di uangkan dalam nota keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari RUU APBN yang disampaikan kepada DPR.

### **Pengertian Manajemen Anggaran.**

Manajemen anggaran atau budgeting adalah perencanaan sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan atau biasa disebut anggaran, yang berlaku dalam jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang. (Bastian, 2010:71)

Anggaran merupakan suatu alat yang digunakan manajemen untuk menjalankan rencana-rencana atau target yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka pendek yang dinyatakan dalam satuan unit kuantitatif. Anggaran digunakan sebagai alat atau sistem pengendalian manajemen yang sangat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi baik di sektor swasta maupun di sektor publik (Wati dkk, 2013).

### **Laporan Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Timur**

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Laporan keuangan Kepolisian Daerah Jawa Timur disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode 31 Desember disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

LKPP Tahun 2016 merupakan LKPP yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh) laporan, yaitu: (a) Laporan Realisasi APBN ; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis dan pendekatan penelitian merupakan komponen yang paling penting dalam penelitian. Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain penelitian dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Sugiyono (2015:2) mengemukakan bahwa “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada metode penelitian deskriptif kualitatif ini, akan sangat bermanfaat untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang ada, yang didapatkan di lapangan. Tahap awal metode kualitatif ini, peneliti melakukan penjelajahan,

kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam dengan melakukan wawancara, observasi hingga penyusunan laporan.

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Tahap pertama, penulis mendatangi lokasi penelitian yaitu di Polres Malang, Polres Batu, Polres Kediri, Polres Kediri Kota, Polres Trenggalek, Polres Blitar dan Polres Blitar Kota. Sedangkantahap kedua penulis melakukan penelitian dengan mendatangkan beberapa Kasikeu Polres/Polresta ke kantor Bidang Keuangan Polda Jatim yang terletak di Markas Komando Kepolisian Daerah Jawa timur di jalan Ahmad Yani No 116-118 kota Surabaya, pada saat bersamaan dengan pengambilan cek tunjangan kinerja.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 yang menganalisis 39 Satuan Kerja kewilayahan Polda Jawa Timur dengan mengumpulkan data Laporan Realisasi Anggaran triwulan I sampai dengan triwulan III tahun anggaran 2018 dan wawancara dengan beberapa bendahara (Kasikeu) Satuan Kerja kewilayahan dengan pedoman Laporan Realisasi Anggaran per triwulan pada masing-masing satuan Kerja.

### **Jenis dan Sumber Data**

Ada dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif, data kuantitatif merupakan data atau informasi yang di dapatkan dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka ini maka data kuantitatif dapat di proses menggunakan rumus matematika atau dapat juga di analisis dengan sistem statistik. Sedangkan data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat di lakukan melalui wawancara.

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder. Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan wawancara, maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan.

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa Laporan Realisasi Anggaran pada triwulan I,II dan III tahun anggaran 2018 yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Penulis mendapatkan data sekunder ini dari Subbidbia dan APK Bidkeu Polda Jatim, serta foto-foto kegiatan wawancara dalam rangka perolehan data tersebut.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian (Sugiyono, 2015:308). Pada penelitian ini teknik pengumpulan yang digunakan adalah yaitu, observasi, wawancara dan angket.

### **Teknik Analisis Data**

Data Sugiyono (2016: 244) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data versi Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:246), bahwa ada tiga alur kegiatan dalam proses pengumpulan data, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **Keadaan Geografis**

Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa (Kepulauan Masalembu), dan Samudera Hindia (Pulau Sempu dan Nusa Barung). Provinsi didiami oleh kelompok etnis yang beragam yaitu suku Jawa, suku Madura dan orang Tionghoa-Indonesia. Sebagian besar masyarakat di Jawa Timur menganut agama Islam, sekitar 96% dari total populasi. Agama lain seperti Kristen, yang sebagian besar dianut oleh orang Tionghoa-Indonesia dan imigran dari Indonesia Timur dan Sumatra Utara, dan juga agama Hindu yang kebanyakan dianut oleh suku Tengger di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan suku Bali yang mendiami bagian paling timur provinsi yang berbatasan dengan Bali. Wilayah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur terbagi menjadi 3 kelompok yaitu wilayah kota besar, wilayah kota dan kabupaten. Terdiri dari 39 Satuan Kerja kewilayahan yang terdiri dari 1 Polrestabes yaitu Polrestabes Surabaya, 3 Polresta yaitu Polresta Sidoarjo, Polresta Malang Kota dan Polresta Banyuwangi, serta 35 Polres yang berkedudukan di kota maupun kabupaten seluruh wilayah Jawa Timur.

### **Hasil Penelitian**

#### **Penyerapan Anggaran Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2018 yang Disusun oleh Satuan Kerja di Kewilayahan Polda Jatim**

Berdasarkan pada data penyerapan anggaran pada triwulan I tahun anggaran 2018, hal-hal yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran sangat dipengaruhi oleh Jumlah personel yang ada pada setiap Satker khususnya anggota Polri sebagai pelaksana kegiatan operasi kepolisian, Profesionalisme masing-masing anggota dalam melaksanakan tugasnya baik di bidang operasi maupun administrasi, Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepolisian baik operasi maupun administrasi, Tempat kedudukan/ letak geografis Markas Komando baik di wilayah Kota, Kabupaten dan Desa. Adanya kegiatan operasi kepolisian terpusat dari Biro Operasi Polda Jatim dan

adanya pengamanan khusus kegiatan Pemilihan Kepala Daerah atau anggota legislatif, Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun data peringkat penyerapan anggaran Satker kewilayahan Polda Jatim untuk triwulan I tahun anggaran 2018. Diketahui bahwa rata-rata penyerapan belanja barang untuk 39 Satuan Kerja kewilayahan Polda Jatim masih dibawah standar penilaian IKPA dengan prosentase sebesar 13%. Sedangkan untuk penyerapan belanja modal dari 39 Satuan Kerja kewilayahan Polda Jatim baru terdapat 5 Satker yang sudah melakukan penyerapan anggaran untuk pengadaan almatsus *scanner* dengan nilai Rp. 43.500.000,00. Dengan demikian prosentase penyerapan anggaran belanja modal untuk triwulan I tahun anggaran 2018 pada Satker kewilayahan Polda Jatim baru mencapai angka 0,31%. Secara umum dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada Satker kewilayahan Polda Jatim masih sangat rendah dibandingkan standar IKPA yang harus dicapai yaitu sebesar 20% pada triwulan I.

### **Penyerapan Anggaran Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2018 yang Disusun Oleh Satuan Kerja di kewilayahan Polda Jatim.**

Dari data yang diolah dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat penyerapan anggaran pada triwulan II tahun anggaran 2018 untuk belanja barang dan belanja modal masih belum mencapai standar IKPA yang ditetapkan yaitu sebesar 60%. Dimana prosentase tingkat penyerapan anggaran triwulan II masih mencapai 21,28% untuk belanja barang dan 2,09% untuk belanja modal.

### **Penyerapan Anggaran Pada Triwulan III Tahun Anggaran 2018 yang Disusun oleh Satuan Kerja di Kewilayahan Polda Jatim.**

Dari data tabel penyerapan anggaran pada triwulan III yang telah dioalah dapat dianalisa bahwa 75% Satker kewilayahan Polda Jatim telah melaksanakan penyerapan anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Hanya beberapa Satker saja yang belum bisa mencapai target penilaian IKPA dikarenakan adanya tambahan hibah uang untuk belanja modal yang baru sah diterima oleh Satker dan masuk kedalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satker pada triwulan III. Dalam hal ini proses pencatatan hibah harus melalui prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Panjangnya proses pemberian hibah sampai pada pencatatan dalam daftar DIPA Satker merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran pada triwulan III ini. Penyerapan anggaran belanja barang terendah pada Polres Pasuruan Kota yaitu masih mencapai 45,72%. Hal ini terjadi karena keterlambatan penagihan dari pihak ketiga (Pertamina) untuk pendistribusian BBM kendaraan dinas.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Pencapaian atas target anggaran yang telah disusun dalam (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja pada kementerian / lembaga akan memberikan penilaian terhadap kinerjanya. Senjangan anggaran merupakan jumlah yang dibuat oleh fungsi perencanaan melebihi kebutuhan anggaran dalam



melaksanakan semua kegiatan yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL).Tingkat penyerapan anggaran pada satuan kerja kewilayahan di Polda Jatim pada triwulan I sampai dengan triwulan III tahun anggaran 2018 menjadi fokus dalam penelitian ini. Rendahnya tingkat penyerapan anggaran per triwulan akan mempengaruhi pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selalu menjadi perhatian utama Kementerian keuangan dalam menilai kinerja satuan kerja pada kementerian / lembaga.

### **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sebagai Dasar Pelaksanaan Kegiatan.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan DIPA tidak memiliki pengaruh terhadap rendahnya penyerapan anggaran satuan kerja kewilayahan. Berbeda dengan hipotesis sebelumnya yang menunjukkan bahwa dokumen perencanaan memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa DIPA tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran namun digunakan sebagai dasar untuk merencanakan penarikan dana dan pelaksanaan kegiatan yang pada kenyataannya penyerapan anggaran masih belum sesuai dengan rencana panarikan dana yang telah disusun pada setiap awal tahun anggaran.Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Makka (2015), Grace Yunita Liando (2016) dan Desi Fatmawati (2017) yang menghasilkan penelitian bahwa perencanaan memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

### **Jumlah Personel Mempengaruhi Penyerapan Anggaran**

Jumlah personel yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja kewilayahan dalam hal ini adalah Polrestabes/Polresta/Polres berbeda-beda menurut luas wilayah hukumnya, tingkat kerawanan dan jumlah penduduk. Pelaksanaan tugas pokok kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat haruslah selalu siap disaat masyarakat membutuhkan. Dari hasil wawancara mengenai jumlah kekuatan personel pada setiap Polres diperoleh jawaban yang sama untuk seluruh Polres yaitu kurangnya personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan operasi kepolisian. Walaupun seluruh personel bagian administrasi telah dikerahkan untuk melaksanakan tugas, namun masih saja terjadi kekurangan.Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Makka (2015), Grace Yunita Liando (2016) dan Desi Fatmawati (2017).

### **Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Penyerapan Anggaran**

Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan jawaban dari para Kasikeu Polres bahwa kompetensi sumber daya manusia pada seluruh fungsi pada satuan kerja sangat mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran pada satuan kerja kewilayahan Polda Jatim. Untuk anggota yang bertugas dibagian operasional, pengalaman dan pengetahuan yang tinggi sangat menunjang cepat selesainya tugas-tugas dilapangan. Kecepatan dan ketepatan dalam melakukan tindak kepolisian akan menunjang cepat selesainya kegiatan. Dengan anggaran berbasis pada kinerja meningkatkan daya serap anggaran. Setelah tugas selesai dilaksanakan maka anggaran

bisa diserap secara keseluruhan walaupun menggunakan dana Uang Persediaan terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil penelitian untuk bagian administrasi, khususnya anggota yang bertugas melaksanakan proses pengadaan barang/jasa harus memiliki kompetensi sebagai petugas pengadaan dengan syarat telah lulus dan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa. Paham dan melaksanakan ketentuan berdasarkan peraturan yang berlaku serta memiliki dedikasi yang tinggi dan bertanggungjawab untuk segera menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa baik penunjukkan langsung ataupun melalui proses lelang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Makka (2015), Grace Yunita Liando (2016) dan Desi Fatmawati (2017), bahwa kompetensi sumber daya manusia menunjang pelaksanaan tugas dan tingkat penyerapan anggaran.

### **Sarana dan Prasarana Mendukung Penyerapan Anggaran**

Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari *informan*, bahwa sarana dan prasana sangat mendukung tingkat penyerapan anggaran. Baik itu sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas operasi kepolisian dalam menciptakan harkamtibmas maupun tugas-tugas administrasi. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung penyelesaian tugas, baik tugas urtin maupun tugas khusus. Untuk kedalam institusi Polri sendiri ataupun untuk pihak ketiga/rekanan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa. Dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan/tugas berarti penyerapan anggaran sudah bisa dilaksanakan. Sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penyerapan anggaran yang mendukung tugas kepolisian antara lain, Ketersediaannya alat transportasi dinas dalam keadaan baik dan siap pakai. Hal ini sangat membutuhkan perawatan secara rutin dan biaya perawatannya dapat diserap pada belanja barang pemeliharaan. Peralatan komputer dan peralatan khusus kepolisian yang mendukung cepat selesainya pelaksanaan tugas. Hasil penelitian ini tidak menjadi fokus penelitian terdahulu baik oleh Makka (2015), Grace Yunita Liando (2016) dan Desi Fatmawati (2017) yang tidak meneliti sarana dan prasarana sebagai faktor penyebab rendahnya tingkat penyerapan anggaran.

### **Tempat Kedudukan/Letak Geografis Menghambat Tingkat Penyerapan Anggaran**

Polres Sumenep yang wilayah hukumnya terdiri dari kepulauan-kepulauan kecil dan Polres Pacitan yang letak geografisnya berada di pegunungan yang rawan longsor sangat mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran khususnya pada belanja modal untuk pembangunan dan pengadaan alat khusus Kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengiriman laporan pelaksanaan kegiatan melalui fasilitas sambungan internet sulit dilakukan dikarenakan signal yang tidak memadai. Ketersediaan rekanan untuk pengadaan barang/jasa sangat terbatas mengakibatkan proses pengadaan barang/jasa dan lelang terhambat. Kondisi seperti ini akan sangat mempengaruhi kinerja satuan kerja yang berakibat pada rendahnya tingkat penyerapan anggaran khususnya di triwulan I sampai dengan triwulan III. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Makka (2015), Grace Yunita Liando (2016) dan Desi Fatmawati (2017) yang tidak menyebutkan letak geografis sebagai penyebab rendahnya tingkat penyerapan anggaran.

### **Adanya Kegiatan Operasi Kepolisian Terpusat Mengurangi Pencapaian Tingkat Penyerapan**

Dari hasil penelitian menyebutkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan anggaran khususnya pada triwulan I sampai dengan III adalah adanya kegiatan operasi Kepolisian terpusat. Kegiatan operasi kepolisian ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan beban anggaran terpusat dari Mabes Polri atau anggaran terpusat tingkat Polda. Hal paling utama yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara bersamaan adalah menghindari terjadinya duplikasi penggunaan/penyerapan anggaran. Hal ini yang akan selalu menjadi obyek pemeriksaan oleh tim pengawasan baik internal Polri (Itwasum dan Itwasda) maupun eksternal Polri (BPK-RI). Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang tidak membahas tentang kegiatan terpusat sebagai salah satu hal yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran.

### **Situasi Harkamtibmas Mempengaruhi Penyerapan Anggaran**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa situasi Harkamtibmas mempunyai pengaruh bagi penyerapan anggaran, yaitu bisa meningkatkan penyerapan anggaran atau tingkat penyerapan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam situasi yang terkendali seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dengan tingkat penyerapan sesuai dengan rencana penarikan dana, Namun dalam situasi tertentu adanya gejolak keamanan atau bencana dapat meningkatkan kegiatan pengamanan. Sesuai dengan aturan yang berlaku, setiap anggota Polri dalam 1 hari bisa melaksanakan 2 kegiatan dengan waktu yang berbeda. Apabila anggaran dibebankan pada DIPA Satker, secara otomatis akan meningkatkan penyerapan anggarannya. Sehingga pencapaian IKPA dapat terpenuhi. Namun bila situasi harkamtibmas meningkat namun didukung dengan anggaran terpusat, maka penyerapan anggaran dalam DIPA Satker akan menurun. Penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang tidak membahas tentang situasi harkamtibmas di wilayah satuan kerja.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil analisa dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rendahkan tingkat penyerapan anggaran dalam Laporan Realisasi Anggaran satuan kerja kewilayahan Polda Jatim dapat disimpulkan yaitu penyerapan anggaran triwulan I tahun anggaran 2018 pada satuan kerja dikewilayahan Polda Jatim pencapaian target masih dicapai oleh 7,6% dari satuan kerja yang ada. Satker yang telah mencapai target tersebut yaitu Polres Tuban, Polres Ponorogo dan Polres Tulungagung dengan tingkat pencapaian penyerapan anggaran sebesar 57% sampai 59% serta tingkat penyerapan anggaran pada triwulan II tahun anggaran 2018 pada satuan kerja dikewilayahan Polda Jatim masih sama dengan triwulan I, belum mencapai target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran secara keseluruhan dari satker yang ada. Dimana pencapaian target IKPA ini hanya 41% dari satker yang ada yaitu sebanyak 16 satker dan penyerapan anggaran pada triwulan III satuan kerja kewilayahan tahun anggaran 2018

pencapaian target dicapai oleh 74% satker yang ada atau sejumlah 29 satker. Hal ini menunjukkan sudah terjadi peningkatan pencapaian kinerja satker kewilayahan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dilapangan, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka peneliti bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat. Bagi Lembaga maupun bagi peneliti selanjutnya yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama yaitu bagi pihak lembaga dalam pelaksanaan kegiatan agar tetap berpedoman pada ketepatan dan kecepatan dalam penarikan anggaran, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja baik untuk pelaksanaan kegiatannya maupun pelaksanaan anggaran. Jumlah personel pada satker harus ditambah agar pelaksanaan kegiatan rutin satker maupun kegiatan terpusat dapat dilaksanakan dengan maksimal sehinggadapat meningkatkan penyerapan anggarannya. Menambah personel yang memiliki kompetensi tertentu untuk melaksanakan tugas sesuai kemampuan yang dimilikinya. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai/layak pakai dengan memperhatikan kondisinya agar selalu siap/memadai saat digunakan serta teknologi yang tinggi sebagai penunjang pelaksanaan tugas. Pengawasan melekat dari pimpinan atau satuan atas dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa agar tepat waktu, tepat sasaran berhasil dan berdayaguna.

Bagi peneliti selanjutnya, Saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih banyak sumber atau referensi yang terkait dengan tingkat penyerapan anggaran agar hasil penelitian dapat lebih baik dan lebih lengkap. Serta peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik dengan melakukan wawancara dengan sumber yang kompeten dalam kajian tingkat penyerapan anggaran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2013. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kursus Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Desi fatmawati. 2017. *Analisa Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hulu Perode Tahun 2013-2015*Jurnal.vol 6 no 6 (2017). Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
- Jimeka. 2016. *Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah (Studi deskriptif pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan)* Jurnal.vol. 1 no 1 (2016). Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Malahayati. Cut. 2015. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh*. Jurnal. Aceh: Universitas SyiahKuala.

- Makka. 2015. *Analisa Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu*. Jurnal vol 15, no 04 (2015).Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.